

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan organisasi menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan di masyarakat. Organisasi adalah setiap bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama (Hasibuan, 2014). Organisasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat terbagi atas dua kelompok besar berdasarkan karakteristik dalam mencapai masing-masing tujuan organisasi. Dua kelompok besar tersebut berupa organisasi sektor publik dan organisasi swasta. Karakteristik khas yang dimiliki organisasi sektor publik berupa kegiatan operasional tidak beracuan pada perolehan laba, sedangkan organisasi swasta beracuan pada perolehan laba.

Didirikan organisasi sektor publik bertujuan kepada bentuk pelayanan yang diberikan kepada publik atau penyedia jasa bagi publik di berbagai bidang untuk kesejahteraan sosial. Berbeda halnya dengan tujuan dari organisasi swasta, yakni menghasilkan laba dengan kegiatan usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan anggota organisasi. Hal unik yang dimiliki organisasi sektor publik ialah penghasilan laba tidak difokuskan untuk memperkaya anggota organisasi. Pelayanan organisasi sektor publik kepada masyarakat dapat disediakan oleh pemerintah maupun kelompok masyarakat, sehingga dibagi menjadi organisasi sektor publik pemerintahan dan non pemerintahan.

Organisasi sektor publik non pemerintahan juga disebut organisasi nirlaba. Istilah organisasi nirlaba mulai dikenal sejak ditetapkannya PSAK 45. Menurut Widodo dan Kustiawan (2001), organisasi nirlaba merupakan instansi dengan kegiatan operasinya tidak berorientasi terhadap laba atau keuntungan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Sesuai dengan karakteristik organisasi yang tidak semata-mata berorientasi pada laba, tetapi organisasi nirlaba pun tidak berada pada keadaan defisit, jika organisasi berada pada keadaan surplus, maka akan didistribusikan untuk kegiatan publik dan tidak didistribusikan kepada pihak pemilik organisasi (Yuesti, 2020).

Organisasi nirlaba bergerak di berbagai bidang, seperti politik, pendidikan, keagamaan, sosial, dan kemanusiaan. Beberapa contoh organisasi nirlaba adalah partai politik, rumah sakit, panti asuhan, dan gereja. Ditetapkannya standar baru dalam penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap penyebutan istilah organisasi “nirlaba” menjadi “nonlaba (*not for profit*)” bagi organisasi sektor publik non pemerintahan. Organisasi nonlaba dan organisasi nirlaba merupakan bentuk organisasi yang memiliki orientasi yang sama, namun hanya berbeda pada penyebutan mengikuti standar terbaru.

Yayasan merupakan salah satu organisasi nonlaba yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan dan kemajuan masyarakat. Segala bentuk aturan maupun syarat terbentuknya Yayasan berkaitan dengan hukum diatur dalam UU Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disempurnakan menjadi UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2001, Yayasan adalah badan hukum terdiri atas

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Sebuah yayasan dalam melaksanakan penyajian laporan keuangan memiliki ketentuan yang mengacu pada pedoman atau standar akuntansi yang telah diterbitkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI), yakni ISAK 35. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35: *Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Berorientasi Nonlaba* telah disahkan pada 11 April 2019 dan mulai berlaku pada 01 Januari 2020. ISAK 35 merupakan interpretasi langsung dari PSAK 1: *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 05 dan ditetapkan untuk menggantikan standar sebelumnya, yakni PSAK 45: *Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Berdasarkan Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) 13: *Pencabutan PSAK 45: Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*, Indonesia telah mengadopsi standar akuntansi internasional, sehingga tidak diijinkan adanya standar akuntansi dengan satu esensi yang sama. PSAK 1 dan PSAK 45 dianggap memiliki esensi yang sama, yakni penyajian laporan keuangan bagi organisasi nonlaba. Diperlukan revisi PSAK 1 agar dapat digunakan oleh semua organisasi dengan berbagai bentuk badan hukum.

Diterbitkan ISAK 35 yang merupakan interpretasi langsung dari PSAK 1 terfokus pada bentuk penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba. Penerapan ISAK 35 di sebuah organisasi nonlaba dapat menunjukkan proses, bentuk, hingga hasil akhir pengelolaan keuangan dalam penyajian informasi keuangan kepada pemangku kepentingan. Penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba sesuai ISAK 35 sangat perlu untuk diterapkan kepada organisasi nonlaba yang belum

menggunakan standar akuntansi keuangan agar kualitas laporan keuangan yang disajikan dapat meningkat. Penyesuaian perlu dilakukan oleh organisasi nonlaba yang masih menggunakan PSAK 45 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan untuk dapat beralih menggunakan ISAK 35. Peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan dengan menggunakan pedoman ISAK 35 dapat meningkatkan rasa percaya pemberi sumber daya terhadap pengelolaan keuangan organisasi dan adanya peluang untuk menarik para pemberi sumber daya baru.

Berdasarkan PSAK 1, definisi dari laporan keuangan merupakan suatu dokumen terstruktur yang menyajikan kinerja dan posisi keuangan sebuah organisasi. Disajikan laporan keuangan oleh organisasi nonlaba merupakan bentuk pemahaman dan pengaplikasian akuntansi sektor publik yang patut dimiliki oleh setiap organisasi nonlaba. Akuntansi sektor publik memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tujuan, sumber pendanaan, pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran, pengaruh terhadap *stakeholder*, sistem manajemen atau akuntansi (Majid, 2019). Sesuai dengan ISAK 35 bahwa terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi nonlaba dalam satu periode akuntansi, yakni Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan yang disajikan organisasi nonlaba kepada publik merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban terhadap sumber daya yang diberikan oleh publik dan dikelola oleh organisasi untuk program peningkatan pelayanan publik.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang berasal dari lembaga publik yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik untuk menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (Rakhmat, 2009). Perolehan sumber daya finansial dari publik oleh organisasi nonlaba wajib untuk dijelaskan bagaimana sumber daya tersebut dikelola hingga dapat memberikan dampak positif kepada publik berupa pelayanan jasa ataupun barang. Akuntabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas kinerja organisasi (Maani 2009), sehingga dapat mengenali kekurangan dan kelebihan dengan lebih baik untuk evaluasi kinerja. Akuntabilitas ini dapat direalisasikan dalam bentuk laporan keuangan kepada publik yang disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Yayasan Senyum Kita merupakan salah satu organisasi nonlaba yang bergerak di bidang pendidikan dan pemberdayaan pemuda. Bentuk pertanggungjawaban dan transparansi organisasi disajikan dalam laporan tahunan dan dipublikasikan melalui website resmi Yayasan Senyum Kita. Laporan tahunan (*annual report*) disajikan dengan memaparkan pelaksanaan program kerja, alokasi pemasukan dan pengeluaran, serta laporan arus kas pada periode waktu tertentu.

Penggunaan ISAK 35 sebagai dasar penyajian laporan bagi organisasi nonlaba khususnya yayasan diharapkan mampu membuat keseragaman pemahaman mengenai bentuk laporan keuangan yang perlu disajikan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat (5) UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan menyatakan bahwa, Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Penyajian format laporan keuangan sesuai ISAK 35 dapat mempermudah pemangku kepentingan mengetahui kondisi keuangan yayasan. Berdasarkan uraian di atas maka, penelitian ini berjudul **“Penerapan ISAK 35 Sebagai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Nonlaba Yayasan Senyum Kita”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan ISAK 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan pada Yayasan Senyum Kita?
2. Bagaimana penerapan akuntabilitas publik Yayasan Senyum Kita dalam penyajian laporan keuangan?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Yayasan Senyum Kita saat proses penyajian laporan keuangan berpedoman ISAK 35?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah penelitian, yakni pada hal-hal yang berkaitan dengan proses penyajian laporan keuangan berbasis ISAK 35 dan akuntabilitas publik pada Yayasan Senyum Kita. Laporan keuangan periode tahun 2021 digunakan sebagai data penelitian dengan dasar pertimbangan. Pertimbangan peneliti menggunakan laporan periode tahun 2021, karna fokus terhadap format penyajian laporan keuangan terbaru dan dapat menjadi referensi ataupun acuan untuk laporan keuangan periode tahun selanjutnya.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan ISAK 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan pada Yayasan Senyum Kita.
2. Untuk mengetahui penerapan akuntabilitas publik Yayasan Senyum Kita guna meningkatkan kepercayaan publik.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Yayasan Senyum Kita selama proses penyajian laporan keuangan.

1.5. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak berikut, yaitu:

1. Bagi Yayasan Senyum Kita

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk proses penyajian laporan keuangan Yayasan Senyum Kita berdasarkan standar yang ditetapkan DSAK IAI, yakni ISAK 35 dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penerapan akuntabilitas publik oleh yayasan.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi menambah informasi bagi penelitian selanjutnya di bidang akuntansi sektor publik khususnya terhadap penyajian laporan keuangan organisasi yayasan berpedoman pada ISAK 35 serta penerapan akuntabilitas publik.

3. Bagi Peneliti

Proses penelitian dilaksanakan dengan komunikasi bersama pihak eksternal sebagai subjek penelitian, sehingga menambah wawasan peneliti

mengenai fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan proses penyajian laporan keuangan Yayasan.

1.6. Definisi Operasional

Diperlukan pemahaman mengenai beberapa istilah di dalam penelitian ini yang berjudul “Penerapan ISAK 35 Sebagai Pedoman Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Berorientasi Nonlaba Pada Yayasan Senyum Kita” agar tidak menimbulkan salah tafsir dan interpretasi dari pembaca. Beberapa istilah tersebut, yaitu:

1.6.1. Penyajian Laporan Keuangan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa definisi dari penyajian adalah proses atau cara menyajikan sebuah informasi dalam bentuk dokumen, makalah atau pagelaran. Tercantum dalam PSAK 1, laporan keuangan merupakan suatu dokumen terstruktur yang menyajikan kinerja dan posisi keuangan sebuah organisasi. Menurut definisi di atas disimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan adalah proses atau cara menyajikan sebuah informasi yang terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam bentuk dokumen.

1.6.2. Organisasi Nonlaba

Menurut ISAK 35, definisi dari organisasi nonlaba ialah organisasi tidak berorientasi terhadap penghasilan laba yaitu “nonlaba” (*“not-for-profit”*). Organisasi nonlaba dalam kegiatan operasionalnya memiliki karakteristik tidak berorientasi pada penghasilan laba, memiliki tujuan mulia, dan tidak memiliki

kepemilikan. Beberapa organisasi yang termasuk ke dalam organisasi nonlaba seperti, Yayasan, rumah sakit, gereja, sekolah dan panti asuhan.

1.6.3. Yayasan

Menurut UU Nomor 16 Tahun 2001, definisi dari Yayasan adalah sebagai berikut:

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”. Lembaga masyarakat berada di bawah naungan Yayasan dengan berbagai program yang dilaksanakan yakni, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan lembaga kemanusiaan. Yayasan diatur secara hukum dalam UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

1.6.4. Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35: *Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba* ditetapkan menjadi standar akuntansi keuangan yang baru bagi penyajian laporan keuangan organisasi nonlaba untuk menggantikan PSAK 45. ISAK 35 mulai diberlakukan secara umum pada 01 januari 2020. Organisasi nonlaba menggunakan ISAK 35 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan dengan melampirkan 5 komponen, yakni Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Arus Kas, Dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.6.5. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban yang berasal dari lembaga publik yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik untuk menjawab berbagai hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban (Rakhmat, 2009). Akuntabilitas digunakan sebagai alat untuk mengukur kualitas kinerja organisasi sehingga dapat mengenali kekurangan dan kelebihan organisasi untuk evaluasi kinerja. Bentuk akuntabilitas publik yang dapat dilakukan organisasi dengan menyajikan laporan keuangan organisasi.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Dilandasi filsafat *postpositivisme*, dengan objek ilamiah, peneliti memiliki peran yang besar atau kunci dalam penelitian, metode pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan hasil penelitian lebih menekankan kepada makna (Sugiyono, 2015).

1.7.2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu karakter yang dimiliki objek, orang, atau peristiwa dengan variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2018). Objek dalam penelitian ini berupa penyajian laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Subjek penelitian adalah orang pada lokasi penelitian digunakan sebagai sumber informasi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi disebut sebagai informan (Moleong, 2010). Subjek dalam penelitian ini adalah Yayasan Senyum Kita. Informan dalam penelitian adalah

pihak yang memahami sejarah, struktur, kondisi Yayasan secara spesifik, memahami dan melaksanakan proses penyajian laporan keuangan.

1.7.3. Jenis Data

Data terbagi menjadi dua jenis yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dan diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari pihak lain atau dikumpulkan dari catatan atau basis data yang sudah ada (Hartono, 2016). Penelitian menggunakan jenis data berupa data primer dan data sekunder.

1.7.4. Data Penelitian

Data penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian terhadap Yayasan Senyum Kita, yaitu:

1. Gambaran umum mengenai Yayasan Senyum Kita
2. Proses penyajian laporan keuangan Yayasan Senyum Kita
3. Hasil wawancara dengan Pengurus Yayasan Senyum Kita
4. Laporan keuangan Yayasan Senyum Kita periode tahun 2021

1.7.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah tahapan paling strategis dalam pelaksanaan penelitian, sebab memperoleh data merupakan tujuan utama penelitian (Sugiyono, 2015). Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, dokumentasi, atau gabungan (triangulasi). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi yang terdiri atas:

1. Metode observasi

Menurut Nasution (1988) menyatakan bahwa, dasar semua ilmu pengetahuan adalah melakukan observasi yang menghasilkan fakta mengenai dunia kenyataan digunakan sebagai data untuk para ilmuwan bekerja (Sugiyono, 2015). Peneliti secara langsung berkunjung ke Yayasan Senyum Kita untuk melakukan observasi.

2. Metode wawancara

Menurut Esterberg (2002) menyatakan bahwa, wawancara dilakukan dengan pertemuan dua orang dengan tujuan bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga, dapat di bangun pemahaman suatu topik tertentu. (Sugiyono, 2015). *In depth interview* atau wawancara secara mendalam dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pengurus Yayasan Senyum Kita dengan pertanyaan yang dapat berkembang secara lebih luas.

3. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan dokumen atau catatan peristiwa di masa lalu berupa tulisan, gambar, maupun audio yang dapat memberikan tambahan informasi (Sugiyono, 2015). Dokumen dalam penelitian ini berupa laporan keuangan Yayasan Senyum Kita.

1.7.6. Metode Analisis Data

Penelitian kualitatif melakukan analisis data dapat dilakukan saat pengumpulan data tengah berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Metode analisis data didasari dengan model Miles and Huberman (1984) bahwa,

aktivitas dalam analisis data penelitian kualitatif berlangsung terus menerus sampe tuntas (Sugiyono, 2015). Aktivitas atau tahapan yang dilakukan terdiri atas:

1. Reduksi data, yakni menyederhanakan data yang diperoleh agar lebih sederhana dan memilah data penting. Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi merupakan data kompleks yang perlu untuk direduksi.
2. Penyajian data, yakni menyajikan data yang telah disederhanakan agar dapat di pahami dengan lebih mudah oleh pihak yang membutuhkan dapat berupa grafik ataupun tabel.
3. Penarikan kesimpulan, yakni tahapan analisis data dengan hasil kesimpulan yang disajikan agar dapat dipahami oleh pembaca secara mudah.

Beberapa langkah akan dilaksanakan peneliti dalam saat proses analisis data, yaitu:

1. Mereview berbagai data yang dihasilkan melalui tahap observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi bersumber dari Pengurus Yayasan Senyum Kita kemudian direduksi menjadi lebih sederhana.
2. Mengolah data yang telah direduksi dari tahapan pengumpulan data sehingga dapat memperoleh hasil penelitian
3. Menarik kesimpulan untuk digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

1.8. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

BAB I memaparkan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, ORGANISASI NONLABA, YAYASAN, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, ISAK 35, AKUNTABILITAS PUBLIK.

BAB II menyajikan penelitian terdahulu dengan objek penelitian serupa sebagai referensi dan paparan teori-teori dari para ahli berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III : GAMBARAN UMUM ORGANISASI

BAB III menjelaskan mengenai gambaran umum Yayasan yang terdiri atas sejarah, lokasi, visi dan misi, struktur organisasi, program kegiatan, dan laporan keuangan Yayasan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari pengumpulan data dan dilakukan pembahasan mengenai data yang telah diolah oleh peneliti

BAB V : PENUTUP

BAB V menyajikan kesimpulan atas hasil penelitian, dan saran yang dapat diberikan kepada subjek penelitian maupun saran terhadap penelitian selanjutnya